

APBD Kaltim Terpangkas Rp6 Triliun

Sumber: KALTIM POST Senin, 01/12/2025

Pemangkasan transfer pusat membuat ruang belanja daerah tergerus drastis dari proyeksi Rp21,3 triliun, kini tinggal Rp15,15 triliun. Memaksa seluruh rencana kerja tahun depan ditinjau ulang dan dikurangi.

Samarinda – Pemprov dan DPRD Kaltim berpacu dengan tenggat pengesahan APBD 2026. Setelah Nota Keuangan disampaikan pada 29 November, pembahasan berlangsung maraton menjelang ketukan palu pada 30 November malam. Di tengah waktu yang sempit, dokumen anggaran dibahas dalam kondisi fiskal yang tertekan.

Dalam penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD 2026, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni, memaparkan fiskal daerah yang sedang tidak baik-baik saja. Kaltim mengalami pemotongan dana transfer yang terbilang besar. Pendapatan transfer yang semua diproyeksi Rp9,33 triliun, kini tersisa Rp3,13 triliun. Hal itu membuat postur anggaran mesti disesuaikan dengan penerimaan. Dari komponen transfer, Dana Bagi Hasil (DBH) yang mendapat tekanan terbesar dengan penurunan Rp4,43 triliun. Sehingga DBH tahun depan hanya Rp1,62 triliun. Dalam situasi ini, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jadi satu-satunya jalan yang bisa dipilih untuk menambal celah fiskal pemangkasan transfer pusat.

Meski demikian, Sri menyebut, pemerintah berkomitmen dalam menjaga kualitas pembangunan yang berjalan tahun depan. “Kolaborasi dan sinergi pemerintah dengan DPRD jadi kunci keberlanjutan pembangunan yang lebih merata dan berkualitas,” katanya dalam Paripurna, Sabtu (29/11) petang. Dalam Nota Keuangan ini, APBD Kaltim tahun depan ditetapkan Rp15,15 triliun dengan pendapatan yang diproyeksi Rp14,25 triliun. Terdiri dari pendapatan asli daerah Rp10,75 triliun, pendapatan transfer Rp3,13 triliun, dan pendapatan sah lainnya Rp362,03 miliar.

Sementara belanja daerah dirancang sesuai APBD yang ditetapkan di angka Rp15,15 triliun. Mencakup belanja operasional Rp8,16 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, belanja tak terduga Rp33,93 miliar, dan belanja transfer Rp5,89 triliun. Di luar itu, pemerintah juga mencatat ada penerimaan pembiayaan senilai Rp900 miliar untuk menopang postur APBD tahun depan. Setelah Nota Keuangan disampaikan, kini Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah kembali melanjutkan penajaman sebelum akhirnya anggaran benar-benar disahkan Minggu (30/11) malam.

Tujuh Fraksi Kritik Nota Keuangan APBD 2026

Tujuh fraksi di Karang Paci punya nada beragam dalam menanggapi nota keuangan, tapi arah kritiknya mengerucut ke titik yang sama. Tentang celah fiskal yang terbuka lebar setelah pemangkasan transfer dari pusat, jalannya program-program prioritas, hingga ruang pembahasan yang teramat sempit untuk penajaman semua rencana pembangunan daerah. Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, Badan Anggaran (Banggar) DPRD perlu kaca pembesar untuk menilik detail pos kegiatan di anggaran yang tersisa. Dalam KUA-PPAS, anggaran disepakati Rp21,3 triliun, namun realitasnya, usai dipangkas pusat hanya tersisa Rp15,15 triliun.

Perubahan sebesar itu, tentunya perlu dibarengi kehati-hatian dalam memeriksa apa saja kegiatan yang ditunda, yang dikurangi volumenya, hingga yang benar-benar dihapus, “Kami perlu detail,” katanya selepas Paripurna. Tapi tak hanya itu catatan kritis yang dilayangkan dewan. Ada juga soal serapan anggaran perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltim.

Jelang akhir 2025, serapan justru baru menyentuh 70 persen dengan realisasi pendapatan di kisaran 60 persen. Meski ada jeda transfer dari pusat, mestinya hal itu tidak jadi alasan pemerintah untuk berbenah dan memperketat pengawasan serapan dan realisasi pendapatan. Politikus PDI Perjuangan ini juga menyentil soal optimalisasi aset daerah yang terus diserukan pemerintah, terutama soal pemanfaatan alur Sungai Mahakam. Wacana itu, kata dia, mesti ditunjukkan dengan kontribusi maksimal ke pundi-pundi daerah.

“Kita punya aset yang panjang dan lebar. Sungai Mahakam, apa yang bisa didapat Kaltim dari itu?” ucapnya. DPRD sudah duduk bersama KSOP, Pelindo, juga MBS, mencari celah agar Mahakam tak hanya jadi jalur, tapi juga jadi sumber kesejahteraan. Dalam bayangannya, jika dikelola serius potensinya tak main-main untuk pembangunan Kaltim. Di akhir wawancara, Nanda, begitu dia disapa, berharap APBD 2026 bisa segera disepakati bersama agar arah pembangunan tahun depan bisa bergerak lebih cepat. **(riz)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, APBD Kaltim Terpangkas Rp6 Triliun, 01/12/2025

Catatan:

1. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
 - (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
3. Pasal 109 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.
4. Dalam Pasal Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyaluran TKD dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas negara ke kas daerah.
 - (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan negara;
 - b. kinerja pelaksanaan kegiatan di daerah yang didanai dari pajak dan dana TKD; dan/atau
 - c. kebijakan pengendalian belanja daerah dan kas daerah, dalam rangka sinergi pengelolaan fiskal nasional.
5. Dalam Pasal 49 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.